

DUKUNGAN KAMPANYE MILITER TERHADAP DIPLOMASI INDONESIA DI PERBATASAN DARAT INDONESIA – TIMOR LESTE

MILITARY CAMPAIGN SUPPORT TOWARDS INDONESIA'S DIPLOMACY IN INDONESIA - TIMOR LESTE BORDER AREA

Nugraha Gumilar¹

Universitas Pertahanan
(gumilarwe@gmail.com)

Abstrak - Sejak Timor –Timur (sekarang Timor Leste) memisahkan diri dari Republik Indonesia membawa dampak permasalahan eksodus masyarakat Timor Leste ke Indonesia dan perbatasan tentang penetapan delimitasi wilayah perbatasan kedua negara yang disebut daerah *Un-resolved segment* dan *Un-Surveyed*, sehingga keberadaan Satgas pasukan penjaga perbatasan (Satgas Pamtas) sangat penting sebagai bentuk kampanye militer untuk mendukung diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan isu – isu tersebut. Postur, penempatan dan pelaksanaan tugas Satgas Pamtas dan Gelar pasukan di wilayah perbatasan menjadi hal yang penting untuk menjaga keamanan negara dan membangun saling percaya antara kedua negara. Dukungan alat peralatan yang memadai sangat dibutuhkan Satgas Pamtas, pada kegiatan sub meeting bidang keamanan joint border meeting peran Satgas pamtas menentukan regulasi pengawasan perbatasan bersama pihak Timor Leste dan menjamin daerah un-resolved dan un-surveyed bebas dari pengelolaan yang dapat menyebabkan timbulnya konflik. Dukungan kampanye militer dalam bentuk penjagaan dan penghentian pembangunan pada daerah konflik akan menjamin stabilitas wilayah sehingga penyelesaian secara diplomasi terkait sengketa perbatasan lebih mudah dilakukan

Kata Kunci: Kampanye Militer, Diplomasi

Abstract – Since East Timor (now Timor Leste) secedes from Republik Indonesia, this brought the issues about Timor Leste people exodus to Indonesia and delimitation border area between the two countries, which called as *unresolved segment* and *unsurveyed*. Therefore, the existence of Border Guard Force (Satgas Pamtas) is very important as a form of military campaign to support Indonesia's diplomacy in resolving those issues. Posture, placement and execution of Satgas Pamtas and troops deploying in border area become important matters to maintain national security and build mutual trust between the two countries. Adequate equipment support is needed by the Satgas Pamtas. At the sub-meeting in security field, joint border meeting, Satgas Pamtas' roles are to determine the regulation of joint supervision in the border area and to ensure the unresolved and unsurveyed areas free from the management that can lead to conflict. Military campaign support in the form of guarding and development termination in conflict areas will ensure the stability of the region. Thus, diplomatic settlement of border disputes is easier to do.

Keywords: Military Campaign, Diplomacy

¹ Penulis adalah Kepala Program Studi Diplomasi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia

Pendahuluan

Pasca referendum, Timor Timur yang sebelumnya merupakan Provinsi Indonesia yang ke-27 resmi menjadi negara berdaulat dengan nama Republik Timor Leste pada 20 Mei 2002. Kemerdekaan Timor Leste pada akhirnya menimbulkan permasalahan baru bagi Indonesia. Masalah utama yang muncul dari kemerdekaan Timor Leste adalah penetapan delimitasi wilayah perbatasan antara kedua negara. Batas wilayah memiliki arti yang sangat penting karena menunjukkan batas kedaulatan wilayah negara. Masalah lainnya adalah eksodus masyarakat Timor Leste ke wilayah Indonesia, sehingga membutuhkan penanganan yang serius. Masyarakat Timor-Timur yang mengungsi ke Indonesia memiliki kesamaan kultur dengan masyarakat Timor Barat, sehingga mereka dapat berintegrasi dengan masyarakat lokal dengan mudah. Batas negara yang memisahkan mereka, menurut tokoh setempat bukan sebagai fenomena politik, namun cenderung ke perspektif sosial, budaya dan ekonomi.

Permasalahan utama perbatasan antar kedua negara adalah terdapat daerah sengketa yang berada dalam kondisi *un-resolved segment* dan *un-*

surveyed segment. Daerah *un-resolved segment* adalah daerah yang belum disepakati/belum diputuskan garis batasnya, yaitu daerah Noel Besi/Citrana Kabupaten Kupang dan Bijael Sunan-Oben Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).² Selain masalah *Un-resolved segment*, terdapat persoalan batas negara antara Indonesia-Timor Leste yang sudah disepakati/diputuskan namun tidak diakui oleh masyarakat setempat (*un-surveyed segment*) yaitu wilayah Nefo Numfo-Haumeniana, Pistana-Baen, dan Tubu Banat-Nilulat.³ Seluruh daerah sengketa berada pada perbatasan Distrik Oecusse, Timor Leste dengan Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Utara. Kedua masalah sengketa perbatasan ini dapat menimbulkan konflik komunal antar masyarakat kedua negara. Penanganan wilayah sengketa sama pentingnya dengan penanganan keamanan perbatasan.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah aktor utama yang bertugas menjaga wilayah perbatasan.⁴ Pergelaran

² Korem 161. 2015. *Materi Paparan Danrem 161 Wira Sakti Tentang Kondisi Wilayah Korem 161 Wira Sakti*. Disampaikan Pada Acara Penyambutan Peserta KKDN/Hanwil Pasis Dikreg XLII Sesko TNI, Kupang 3 Agustus 2015

³ *Ibid.*,

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia*. Pasal 7 Ayat 2.

Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) merupakan bentuk strategi kampanye militer untuk menjaga kedaulatan negara dan menjadi *deterrence* terhadap kemungkinan eskalasi ancaman di perbatasan. Penempatan Satgas Pamtas merupakan bentuk pengerahan kekuatan TNI sebagai implementasi keputusan politik pemerintah untuk menjaga keamanan rakyat, kedaulatan teritorial dan stabilitas wilayah.

Sengketa Perbatasan antara Indonesia – Timor Leste

Masalah utama pada perbatasan RI-RDTL adalah terdapat daerah berstatus *un-resolved segment* dan *un-surveyed segment*. Pada daerah *un-resolved segment*, garis batas antara Indonesia dan Timor Leste belum disepakati/diputuskan. Daerah ini menjadi persengketaan dan memicu konflik antara masyarakat RI-RDTL di perbatasan. Permasalahan *un-resolved segment* berada pada dua titik perbatasan Provinsi NTT dengan Distrik Oecusse, Timor Leste. Pertama, daerah Noel Besi/Citrana di wilayah Kabupaten Kupang. Daerah ini belum diukur sehingga statusnya merupakan daerah steril dan tidak dikelola oleh kedua negara. Masyarakat kedua negara tidak diperbolehkan

beraktifitas pada daerah tersebut. Fakta di lapangan menunjukkan masyarakat Timor Leste membangun pemukiman dan bercocok tanam pada wilayah sengketa. Tindakan agresif dilakukan pula oleh pemerintah Timor Leste dengan membangun kantor imigrasi pada akhir tahun 2008 dan kantor Kementerian Pertanian pada pertengahan 2009. Beberapa bangunan permanen milik Timor Leste telah berdiri di Dusun Naktuka diantaranya kantor pertanian, balai pertemuan, gudang dolog dan tempat penggilingan padi.⁵ Pemerintah Timor Leste juga membangun saluran irigasi dan jalan. Seluruh pembangunan berhasil dihentikan satgas pamtas TNI. Pemantauan hingga saat ini terus dilakukan melalui patroli Satgas Pamtas TNI untuk mengamati aktifitas di dusun Naktuka.

Permasalahan perbatasan Indonesia–Timor Leste berikutnya adalah daerah *un-surveyed segment*. Daerah ini memiliki Garis Batas Negara yang telah ditetapkan bersama. Masalah yang terjadi pada daerah ini adalah penolakan masyarakat Indonesia yang memiliki klaim batas berbeda dengan traktat 1904 sehingga survei demarkasi dan penegasan batas darat belum dilakukan.

⁵ *Ibid.*,

Masyarakat tidak menerima penetapan garis batas karena ada wilayah adatnya yang masuk dalam wilayah Timor Leste. Raja-raja (kepala suku) masyarakat setempat berada pada wilayah Indonesia dan meyakini tidak ada yang berani mengambil tanah mereka.⁶ Masyarakat adat menganggap wilayah adat tidak sama dengan wilayah negara, namun dalam penetapan batas negara pertimbangan mengenai wilayah adat tidak digunakan. Lokasi *un-surveyed segment* pada perbatasan Indonesia – Timor Leste adalah:⁷

1. Pada daerah Pitana, terdapat 104 warga desa Sunkaen
2. Pada daerah Haumeniana/Nefo Numfo terdapat 144 warga Desa Haumeniana yang mempermasalahkan tanah seluas 290 Ha
3. Pada daerah Ninulat/Tubu Banat terdapat 60 warga Desa Ninulat yang mempermasalahkan tanah seluas 183,7 Ha

Postur Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Timor Leste.

⁶ Hasil Wawancara dengan Komandan Korem 161 / Komandan Komando Pelaksana Operasi Satgas Pamtas, 30 Oktober 2015. Lapangan Tennis Korem 161, Kupang.

⁷ *Op cit.*, Pasi Operasi Mako Satgas Pamtas Sektor Barat.

Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Timor Leste memiliki jumlah personil yang cukup untuk menjaga total 268,8 km garis perbatasan negara. Penjagaan perbatasan dibagi atas dua wilayah yaitu sektor barat dan timur. Setiap sektor masing-masing diperkuat oleh 350 personil.

Satgas Pamtas Sektor barat bertugas mengawasi 119,7 km perbatasan kabupaten Kupang dan Timur Tengah Utara dengan wilayah enclave, Distrik Oecusse, serta 26,3 km perbatasan di sisi timur antara Kabupaten Malaka dengan wilayah utama Timor Leste. Satgas Pamtas sektor barat terbagi atas tiga Kompi Tempur (Kipur) dan satu Markas Komando (Mako). Kompi Tempur I dan II terdiri atas tujuh unit pos penjagaan, sementara itu Kipur III terdiri atas lima pos.

Satgas Pamtas sektor timur bertugas mengawasi 122,8 km perbatasan antara Kabupaten Belu dan wilayah utama Timor Leste. Daerah Mako Satgas sektor timur membawahi tiga Kipur. Kompi Tempur I terdiri atas enam pos, sedangkan Kipur II dan III terdiri atas tujuh unit pos penjagaan.

Jumlah dan persebaran pos satgas pamtas dinilai tidak cukup untuk menjaga kawasan perbatasan terutama pada

sektor barat yang berbatasan dengan Distrik Oecusse. Garis perbatasan sektor barat sepanjang 146 km dijaga oleh 19 pos yang berada langsung digaris perbatasan atau rata-rata setiap pos menjaga wilayah sepanjang 7,6 km.

Komandan kolakops satgas pamtas menyatakan pergelaran 20 pos di sektor barat dan 21 di sektor timur dibandingkan dengan bentangan luas perbatasan masih kurang.⁸ Akan tetapi, kondisi saat ini masih memungkinkan satgas pamtas menjangkau wilayah perbatasan untuk melakukan patroli.

Satgas Pamtas memerlukan dukungan peralatan, persenjataan, dan sarana pendukung yang lengkap untuk menunjang efektifitas dan efisiensi kinerja pengamanan perbatasan. Kondisi sumber air dan listrik pada pos-pos satgas pamtas belum memadai. Kedua sumber daya tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi.

Akses jalan sepanjang wilayah perbatasan masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Jalan penghubung antar pos hanya 20-30% dalam keadaan beraspal, selebihnya adalah jalanan tanah

yang diperkeras. Kondisi jalan yang kurang baik mempengaruhi penggunaan kendaraan operasional Satgas Pamtas. Setiap pos dibekali oleh satu unit sepeda motor operasional berjenis *Trail*. Sebagian besar sepeda motor operasional rusak karena menempuh medan yang kurang baik

Satgas Pamtas TNI memiliki kemampuan yang sangat baik dalam melaksanakan tugas di perbatasan. Markas besar TNI menetapkan satgas pamtas perbatasan merupakan satuan tempur yang memiliki kemampuan menangkal ancaman fisik secara tiba-tiba. Satgas Pamtas memiliki kemampuan beradaptasi dengan masyarakat perbatasan dengan baik. Berbagai kegiatan pembinaan teritorial yang dilaksanakan dapat mendekatkan satgas pamtas dengan masyarakat.

Penyesuaian Postur sebagai Strategi Pengamanan Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Pergelaran pasukan satgas pamtas sepanjang perbatasana adalah strategi pengamanan wilayah sekaligus mampu mendukung upaya diplomasi penyelesaian masalah perbatasan. Analisis utama penelitian ini menggunakan model strategi yang

⁸ Hasil Wawancara dengan Komandan Korem 161 / Komandan Komando Pelaksana Operasi Satgas Pamtas, 30 Oktober 2015. Lapangan Tenis Korem 161, Kupang. Perhitungan termasuk Mako Satgas

dirumuskan Arthur F. Lykke, “*strategy = ends + ways + means*”. *Ends* atau tujuan pergelaran pasukan adalah menjaga keamanan perbatasan dan secara tidak langsung mendukung diplomasi perbatasan. *Ways* atau konsep yang digunakan mencapai keamanan perbatasan adalah pergelaran pasukan satgas pamtas. *Means* atau sumber daya yang mendukung pergelaran adalah manusia, peralatan, persenjataan, dan sarana pendukung. Strategi akan efektif apabila ketiga unsur memiliki keseimbangan. Penyesuaian unsur-unsur diperlukan agar strategi berjalan dengan optimal.

Satgas Pamtas menjalankan peran penjagaan patok, keamanan perbatasan, pos lintas batas, dan melaksanakan pembinaan teritorial untuk masyarakat perbatasan. Akan tetapi, kelemahan dari pergelaran pasukan satgas pamtas adalah dukungan sumber daya (*means/resources*). Keterbatasan sumber daya merupakan kondisi yang harus mendapat penanganan agar strategi pengamanan perbatasan efektif.

Berdasarkan temuan dilapangan, jumlah pos satgas pamtas yang ada saat ini dinilai masih kurang jika dibandingkan dengan luas bentangan wilayah dan konturnya. Oleh karena itu diperlukan

penyesuaian dengan menambah jumlah pos satgas pamtas untuk meningkatkan efektivitas strategi pengamanan. Pembangunan pos diharapkan berada pada posisi yang strategis yaitu berada pada titik ketinggian yang mampu memberikan penglihatan yang luas, dekat dengan jalur transportasi dan serta dekat dengan patok.

Kebutuhan komunikasi, listrik, dan sumber air adalah kebutuhan primer yang harus terpenuhi. Sistem komunikasi yang handal adalah aspek yang penting dalam pengawasan karena menentukan koordinasi antar pos dengan pengambil kebijakan yaitu Mako atau Dankolakops. Saat ini satgas hanya mengandalkan radio yang sangat bergantung pada energi listrik dan kondisi cuaca. Penggunaan *handphone* mengalami keterbatasan sinyal dan *roaming*. Dukungan peralatan dan sistem komunikasi yang baik sangat penting karena jarak antar pos cukup jauh. Peralatan pendukung pengawasan dan pemeriksaan pada pos satgas pamtas sangat minim. Hanya sebagian kecil pos yang memiliki menara pengintai setinggi empat meter, namun tidak dilengkapi oleh teropong.

Dukungan Satgas Pamtas terhadap Diplomasi Perbatasan Indonesia – Timor Leste.

Arena diplomasi perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste diselenggarakan dalam beberapa forum pertemuan. Indonesia dan United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) adalah aktor yang pertama kali menginisiasi pembentukan *work plan* perbatasan Indonesia dan Timor Leste melalui pembentukan *Joint Border Committee* (JBC) dan *Joint Ministerial Commission* (JMC) pada tahun 2000⁹.

Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan TNI memainkan peran pada level JBC dan *Technis Sub –Commission* (TSC) bidang keamanan. Berbagai aspek kehidupan perbatasan diketahui oleh satgas pamtas mulai dari sisi keamanan, ekonomi, hingga sosial budaya. Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan TNI Korem 161 lebih banyak berperan secara langsung pada level pertemuan teknis bidang keamanan.

Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan memiliki agenda dalam pertemuan TSC diantaranya membahas mekanisme patroli, mekanisme operasional lapangan, sistem komunikasi,

dan aturan mengenai terjadinya pelanggaran. Pengaruh dukungan satgas pamtas bagi diplomasi perbatasan tidak hanya berasal dari forum perundingan, namun juga dari pelaksanaan kampanye militer di wilayah perbatasan.

Kampanye militer berupa pergelaran pasukan pada wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste secara tidak langsung turut mendukung pelaksanaan diplomasi di perbatasan. Keberadaan Satgas Pamtas TNI yang melaksanakan tugas patroli patok perbatasan, patroli keamanan perbatasan, penjagaan pos lintas batas, serta pembinaan teritorial memberi jaminan terhadap keamanan dan stabilitas daerah perbatasan.

Pencegahan konflik horizontal dapat dilakukan melalui langkah diplomasi dimana pihak yang berkonflik memahami norma dan aturan yang berlaku dan secara bersama-sama menentukan langkah yang pantas sehingga dapat dicegah penggunaan kekuatan kekerasan (*use of force*). Kondisi ini sesuai dengan pendapat Jonsson dan Hall dalam bukunya *Essence of Diplomacy*, diplomasi dilihat sebagai sebuah institusi sosial, dipahami secara umum sebagai kumpulan praktik sosial yang relatif stabil dan didasari oleh norma, aturan, maupun

⁹ *Loc cit.*, Sri Handoyo

konvensi yang mendefinisikan tindakan-tindakan yang pantas dilakukan serta mengatur tata kelola hubungan antar anggota institusi sosial tersebut.¹⁰ Sederhananya, diplomasi sangat berkaitan dengan norma dan nilai dalam membangun hubungan dengan negara lain, bertolak belakang dengan pendekatan yang lebih menggunakan kekuatan kekerasan (*use of force*) untuk mencapai kepentingannya. Melalui diplomasi perbatasan, Satgas Pamtas dapat membangun hubungan dan membujuk pihak yang berkonflik tidak terlibat dalam pemusuhan dengan meminimalisir atau mencegah keterlibatan aktor asing.

Kesimpulan

Kinerja Satgas pamtas sedikit terganggu karena keterbatasan alat peralatan, sarana prasarana dan infrastruktur, namun tetap mampu mendukung diplomasi perbatasan khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian *un-resolved* dan *un-surveyed segment*.

Kinerja satgas pamtas berperan besar mendukung diplomasi perbatasan Indonesia terhadap Timor Leste. Dankolakops Satgas Pamtas ikut serta

dalam forum Joint Border Meeting dan memberikan saran kepada pemerintah secara langsung. Pada sub-meeting bidang keamanan Joint Border Meeting, satgas pamtas terlibat langsung untuk menentukan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pengawasan keamanan perbatasan bersama pihak keamanan Timor Leste.

Secara fisik, pengawasan perbatasan khususnya daerah *un-resolved* dan *un-surveyed segment* steril dari pengelolaan yang dapat menyebabkan timbulnya konflik. Satgas pamtas berperan mencegah pengelolaan lahan sengketa oleh masyarakat kedua negara dan pemerintah Timor Leste. Penjagaan dan penghentian pembangunan pada daerah konflik akan menjamin stabilitas wilayah sehingga penyelesaian sengketa perbatasan lebih mudah dilakukan

Daftar Pustaka

Buku

- Barston, R. P, (1997). *Modern Diplomacy*. London: Longman
- Bartholomees. J.B, (ed). (2010) *The U.S. Army War College Guide to National Security Issues, Volume I: Theory of War and Strategy*, 4th Ed., Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College
- Blanchard, J.M.F, (2005). *Linking Border Disputes and War: An Institution-Statist Theory*. Geopolitics Vol.10,

¹⁰ Christer Jonsson dan Martin Hall. *Essence of Diplomacy*. (New York: Palgrave Macmillan,2005). H.25

- Buzan. B (1991). *People, State, And Fear ; A Agenda For Internasional Security Studies In The Post Cold Era 2nd edition*. London : Harvester Whatsheaf.
- Buzan. B., Weaver. O., dan Wilde. J.D. (1998). *Security: A New Framwork for Analysis*. London: Lynne Rienner.
- Cerami. J.R, dan Holcomb. J. F. (ed) (2001). *U.S. Army War College Guide To Strategy*. diakses melalui <<http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/ssi/00354.pdf>>
- Cresswell, J.W. (2011). *Educational Research Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Boston: Pearson.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia. (2008). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*. Jakarta: Departemen Pertahanan Republik Indonesia.
- Dinas Sejarah Angkatan Darat. (2012). *Peranan TNI AD Dalam Pengamanan Perbatasan NKRI*. Bandung: DISJARAHAD
- Ganewati, W. et all. (2009) *Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- H.G. Brauch et al. (ed). (2011). *Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security*. Berlin: Springer-Verlag
- Irawan, P (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
- Liebenberg, E. et all (ed) (2012). *History of Cartography: International Symposium of the ICA 2012*. Heidelberg: Springer
- Sarwono, J. (2014). *Strategi Melakukan Riset Kuantitatif, Kualitatif Gabungan*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni. V.W. (2014). *Metodologi Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Jurnal**
- Kolne, Y. Implementasi Perjanjian Perbatasan RI – RDTL dalam Upaya Penyelesaian Masalah Perbatasan (Studi Kasus di Kabupaten TTU – RI dengan Distrik Oecusse-RDTL). *Jurnal POLITIKA*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2014
- Rachmawati. I, dan Fauzan. *Problem Diplomasi Perbatasan dalam Tata Kelola Perbatasan Indonesia-Malaysia*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol.16, No. 2, November 2012 (95-186). ISSN 1410-4946.
- Sai, S.S. *Aspek Geodetik Penegasan Batas Darat Indonesia dan Papua New Guinea: Status dan Permasalahannya*. *Jurnal PROC. ITB Sains & Tek*. Vol. 37 A, No. 2, 2005, 131-154.
- Skripsi dan Tesis**
- Hardianto, B.C. (2012). *Strategi Operasi Keamanan Perbatasan Darat dalam Menjaga Kedaulatan Negara di Perbatasan Propinsi Kalimantan Barat (Kajian tentang Aspek Pengorganisasian Satgas Pamtas 2005-2010)*. Tesis. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Leao, F.M. (2012). *Pengaruh Kemerdekaan Republica Democratica Timor Leste Terhadap Pengelolaan Wilayah Perbatasan dengan Negara Kesatuan*

Republik Indonesia. Tesis. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Lopes, D. (2013). *Formulasi Kebijakan Border Pass di Perbatasan Republik Demokratik Timor Leste dan Republik Indonesia dalam Pencegahan Illegal Border Crossing*. Tesis. Bandung: Universitas Padjajaran

Matondang, S.G. (2013). *Gelar Kekuatan Operasi Pengamanan Perbatasan Papua Sektor Utara (Studi Kasus pada Operasi Pengamanan Perbatasan yang Dilaksanakan oleh Detasemen Sandha Pengaman Perbatasan Papua Sektor Utara Kopassus Tahun 2009-2013)*. Tesis. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia

Puspitasari, Y. (2013). *Upaya Indonesia dalam Menangani Masalah Keamanan Perbatasan dengan Timor Leste pada Periode 2002-2012*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Siswanto, B. (2013). *Strategi Pertahanan di Wilayah Perbatasan Kesatuan Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste: Gelar Kekuatan TNI AD di Kabupaten Belu Tahun 2010-2012*. Tesis. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia

Dokumen Resmi

Korem 161. 2015. *Materi Paparan Danrem 161 Wira Sakti Tentang Kondisi Wilayah Korem 161 Wira Sakti*. Disampaikan Pada Acara Penyambutan Peserta KKDN/Hanwil Pasis Dikreg XLII Sesko TNI, Kupang 3 Agustus 2015

Satgas Pamtas RI-RDTL. *Laporan Perkembangan Wilayah Sengketa Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat Ta. 2015*. September 2015

Sekolah Staf dan Komando TNI. (2012). *Naskah Departemen Tentang*

Kampanye Militer. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.

Pasi Operasi Satgas Pamtas Sektor Barat (2015). *Hal-hal yang Menonjol pada Daerah Sengketa*. Dokumen Mako Satgas Pamtas Sektor Barat

Majalah

NN. (2011). *Postur Pertahanan Indonesia di Wilayah Perbatasan Timor-Leste*. Mahehin Nia Hanoin no. 1, Edisi 11 Mei 2011.

Utami, Y. (2011). *Arsip Jaga Kedaulatan NKRI*. Majalah Arsip. Edisi 56.

Undang-Undang

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia*.

Makalah

Antariksa. A.Y. (2014). *Mengenal Pengkajian Strategik, Metodologi Penelitian Ilmiah Serta Pemanfaatannya Dalam Pengkajian Strategik Di Lemhannas RI*. Makalah Portal Lemhannas RI 2014. H. diakses melalui http://www.lemhannas.go.id/porta/attachments/2254_MENGENAL%20PENGAJIAN%20STRATEGIK.pdf